

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan terkait opini audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa temuan yang selalu ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain: 1) Pencatatan keuangan pada Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2011-2014 belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diantaranya PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, serta Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; 2) penatausahaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) Pemerintah Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya optimal karena dokumen kepemilikan aset tetap tidak semuanya dimiliki dan nilai perolehan aset tetap tidak diketahui oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, kemudian terdapat aset tetap yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Nias melalui P3D yang nilai perolehannya Rp 1,00 (satu rupiah) tercatat sebanyak 261 aset tanah; 129 aset peralatan dan mesin; 187 gedung dan bangunan; 240 jalan, jaringan, dan irigasi yang; 3) Kurangnya pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah menyebabkan pengungkapan atas Laporan Keuangan belum maksimal. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan kapasitas pegawai, yaitu

dengan mengadakan Bimbingan Teknis tentang penatausahaan keuangan, penatausahaan aset tetap.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Kota Gunungsitoli agar mempercepat penilaian kembali aset tetap yang bernilai Rp 1,00 (satu rupiah) dengan cara membentuk tim secara khusus untuk melaksanakan revaluasi aset tetap dengan berkolaborasi kepada KPKNL Padang Sidempuan serta meningkatkan kemampuan pegawai dalam menatausahakan aset tetap daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK).
2. Peneliti selanjutnya agar memperdalam pembahasan pada penatausahaan Barang Milik Daerah berpedoman pada PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap dan PSAP 05 Akuntansi Persediaan serta memperdalam pembahasan penatausahaan keuangan dan kas daerah. Penelitian selanjutnya disarankan agar memperdalam kedua pembahasan tersebut dengan membandingkannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lainnya yang mendapatkan opini audit yang sama ataupun berbeda dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kendala yang dialami dalam penelitian ini adalah informan belum terlalu terbuka dalam menjelaskan setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, sehingga kepada peneliti selanjutnya disarankan agar mempersiapkan pertanyaan dan kemampuan dalam menggali informasi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.